

# POLICY BRIEF

## STRATEGI PENANGANAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI JAWA TIMUR

DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT

(Kerja sama dengan BKKBN Jawa Timur)

**BERSAMA PERANGI  
STUNTING**



Mukodi & Deti Rahmawati

**POLICY BRIEF:**  
**STRATEGI PENANGANAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN  
STUNTING DI JAWA TIMUR DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN  
DAN KESEHATAN MASYARAKAT**

**Mukodi<sup>1</sup> dan Deti Rahmawati<sup>2</sup>**

***Executive Summary***

Indonesia emas akan dicapai apabila generasi yang tumbuh adalah generasi yang sehat, kuat, dan berintelegenasi tinggi. Tentunya hal tersebut tidak akan mudah dicapai, jika pada saat ini anak-anak di desa, maupun kota di kabupaten/kota masih mengalami stunting. Percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Timur secara reflektif dapat dilihat dalam lanskap-lanskap studi kasus di tiga Kabupaten, yakni; Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Malang. Tentunya, ketiga kabupaten tersebut, tidak dapat mewakili secara representatif di Jawa Timur. Hanya saja, secara umum pola penanganan kasus prevalensi stuntingnya relatif sama, sehingga dapat digunakan sebagai gambaran umum bentuk penanganan. Penanganan Stunting memerlukan aksi konvergensi, yakni pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah stunting. Terdapat dua intervensi gizi spesifik yang harus dilakukan dalam penanganan kasus stunting; pertama: intervensi spesifik, dan kedua: intervensi gizi sensitive. Intervensi gizi spesifik berprioritas pada: (a) ibu hamil, (b) ibu menyusui, (c) anak-anak 24-59 bulan, (d) remaja dan wanita usia subur. Sementara itu, intervensi gizi sensitive berprioritas pada: (a) peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi, (b) peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi serta kesehatan, (c) peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan; (d) gizi ibu dan anak, serta peningkatan akses pangan bergizi.

**Pendahuluan**

Stunting pada prinsipnya merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak), akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Persoalan stunting di Jawa Timur pada khususnya, dan di Indonesia pada umumnya, diakibatkan banyak faktor, diantaranya; (1) asupan gizi yang kurang memadai; (2) kurangnya akses terhadap makanan; (3) pendidikan keluarga yang masih rendah; (4) faktor politik dan ideologi yang tidak berpihak ; (5) minimnya sumber daya potensial dalam penanganan; (6) minimnya kelengkapan cakupan imunisasi; (7) rendahnya cakupan ASI Eksklusif; (8) pelayanan kesehatan yang tidak memadai; (9) lingkungan yang tidak sehat. Beberapa faktor tersebut, tentunya menjadi memicu tingginya angka prevalensi stunting di Jawa Timur. Artinya, tingginya prevalensi stunting dalam jangka panjang akan berdampak pada rendahnya

---

<sup>1</sup> Associate professor of STKIP PGRI Pacitan, email: mukodi@yahoo.com.

<sup>2</sup> Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember

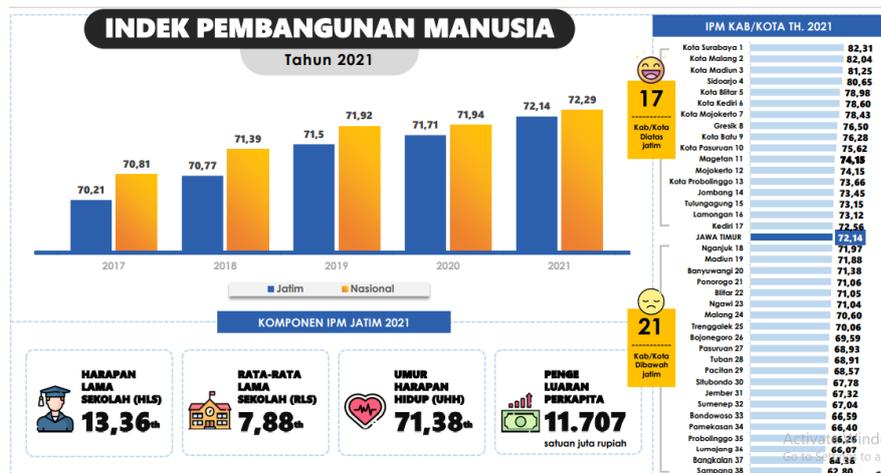
produktivitas nasional. Padahal, produktivitas nasional ditentukan oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, dimana ia menjadi penentu menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan juga sangat ditentukan oleh pembangunan kependudukan, ekonomi, budaya dan karakter bangsa, mengingat penduduk adalah obyek dan subyek dari pembangunan, maka pembangunan harus berpusatkan pada penduduk (*people-centered development*), yaitu pembangunan yang berorientasi kepada potensi dan kebutuhan sosial, ekonomi, budaya dan ketentrangan lahir dan batin penduduk itu sendiri. Dengan demikian, percepatan penurunan stunting di Jawa Timur memerlukan intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkualitas melalui koordinasi pentahelix, sinergi dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan dalam bentuk percepatan penurunan stunting.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. Pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tanggal 28 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menunjuk BKKBN menjadi Ketua Pelaksana Penurunan Stunting di Indonesia. Bahkan, dalam RPJMN 2020-2024, Indonesia menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024. Dan Jawa Timur dengan beragam kekurangan dan kelebihannya pun akan memenuhi target tersebut di atas.

### **Indeks Pembangunan Manusia dan Upaya Penurunan Stunting Di Jawa Timur**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur secara agregat dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dicermati dari IPM pada lima tahun terakhir, dari tahun 2017 hingga 2021 angka agregatnya cukup signifikan, yakni pada 2017 di angka 70,21, naik 0,56 pada tahun 2018 menjadi 70,77, naik 0,73 pada 2019 menjadi 71,5, naik lagi 0,21 pada 2020 menjadi 71,71, dan pada 2021 naik 0,58 menjadi 72,29. Adapun info grafisnya dapat dilihat sebagai berikut:

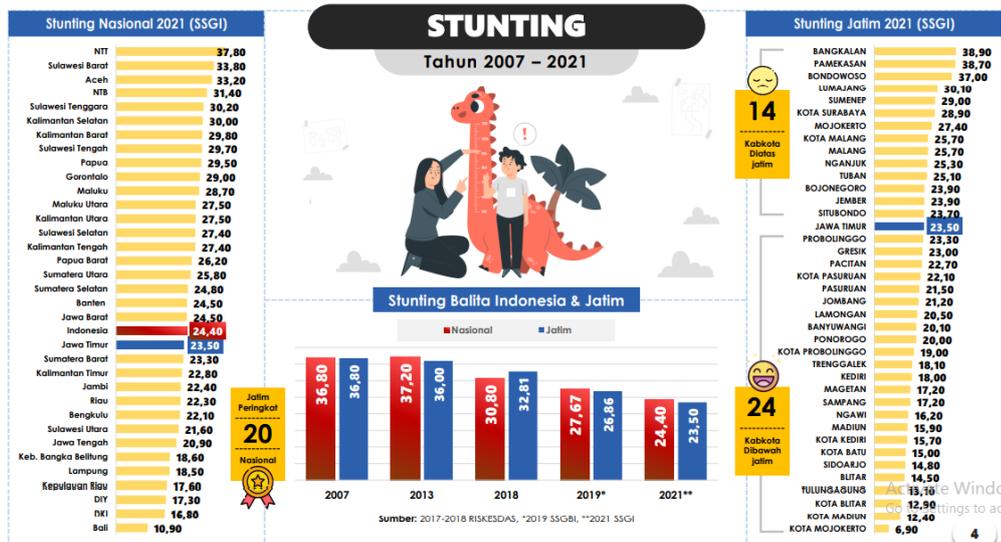


**Grafis 1. Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur**

Sumber: (BPS Provinsi Jawa Timur, 2021)

Kenaikan IPM Jawa Timur tersebut di atas, tentunya menjadi momentum yang sangat baik, dalam upaya menurunkan stunting dan mencapai target prevalensi stunting diangka 14% pada tahun 2024. Penanganan stunting merupakan masalah yang strategis karena menyangkut eksistensi bangsa ke depan. Stunting atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang diakibatkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1000 HPK yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Capaian Prevalensi Stunting di Jawa Timur dari tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami penurunan. Walaupun belum sampai menyentuh target tahunan, namun tercatat menurun dari 26,86% pada 2019 menjadi 25,64% pada 2020. Kemudian menjadi 23,5% pada tahun 2021 (Sri Untari Bisowarno, 2022).

Disisi lainnya, berpijak pada hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), tahun 2021 terdapat 23,5% balita yang mengalami stunting di Provinsi Jawa Timur. Terdapat 14 kabupaten/ kota di Jawa Timur dengan prevalensi balita stunting di atas angka provinsi. Sedangkan 24 kabupaten/kota sisanya memiliki prevalensi stunting di bawah angka provinsi. Kabupaten Bangkalan tercatat sebagai wilayah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Jawa Timur, yakni mencapai 38,9%. Diikuti Kabupaten Pamekasan 38,7%, Kabupaten Bondowoso 37%, Kabupaten Lumajang 30,1%, dan Kabupaten Sumenep 29% (Sri Untari Bisowarno, 2022). Lihat lebih lanjut grafik prevalensi stunting di Jawa Timur sebagai berikut:



**Sumber:**

Data tersebut di atas, memberi makna bahwa walau adanya tren penurunan prevalensi stunting di Jawa Timur yang cukup signifikan, namun untuk mengejar dan memenuhi target penurunan stunting di angka 14% pada tahun 2024 tentunya harus membutuhkan usaha yang lebih keras. Upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur dalam penurunan stunting dengan melakukan delapan aksi integrasi tingkat Kab/ Kota. Adapun kedelapan aksi integrasi tersebut, yakni: (1) analisis situasi; (2) rencana kegiatan; (3) rebug stunting; (4) peraturan Bupati/ walikota tentang peranan desa terkait stunting; (5) pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM); (6) sistem manajemen data; (7) pengukuran dan publikasi stunting; (8) reuiu kerja tahunan. (Mohammad Yasin, 2022)



**Grafis 8 Aksi Integrasi Tingkat Kab/ Kota**

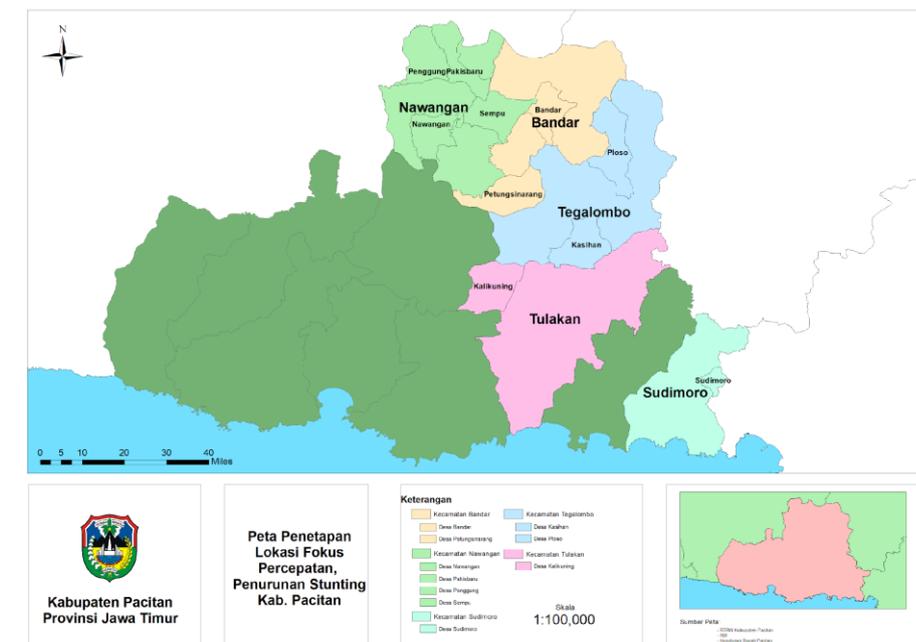
Point terpenting yang harus dipahami bahwa kedelapan aksi integrasi telah, sedang dan akan dilakukan secara bertahap dan keberlanjutan oleh masing-masing kabupaten/ wali kota di Jawa Timur. Delapan Aksi Konvergensi ini merupakan

instrument dalam bentuk kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar agar lebih terpadu dan tepat sasaran.

## Studi Kasus Tiga Profil Kabupaten Di Jawa Timur Dalam Lanskap Penanganan Stunting

### 1. Kabupaten Pacitan

Pacitan merupakan salah satu kabupaten dengan kasus stunting tertinggi se-Jawa Timur. Berdasarkan PK21 BKKBN jumlah anak yang beresiko stunting di Kabupaten Pacitan dengan jumlah agregat sebesar 11445 dengan sebaran di lima Kecamatan dan sepuluh desa di Kabupaten Pacitan, yakni Kecamatan Bandar, Nawangan, Sudimoro, Tegalombo dan Tulakan. Dan sepuluh desa, yakni Desa Bandar, Desa Petungsinaran, Desa Nawangan, Desa Pakisbaru, Desa Penggung, Desa Sempu, Desa Sudimoro, Desa Kasihan, Desa Ploso, dan Desa Kalikuning. Berikut adalah gambaran Peta sebaran lokus stunting di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur:



**Gambar 1. Lokus Stunting Kabupaten Pacitan Tahun 2022**

**Sumber : Peneliti, 2022**

Perlu dipahami, bahwa kesepuluh desa lokus stunting di Kabupaten Pacitan tersebut di atas, didasarkan pada analisis pendataan PK21. Analisis keluarga beresiko stunting pada hakikatnya terpilah menjadi dua, yakni: spesifik dan sensitive. Penghitungan keluarga beresiko stunting menggunakan data Pendataan Keluarga 2021 (PK21). Jumlah variable yang digunakan adalah 4 variable spesifik dan 2 variable sensitif. Empat variable spesifik adalah 4 Terlalu, yakni sebagai berikut: (1) Terlalu Muda Menikah (Umur istri <20 Tahun); (2) Terlalu Tua Menikah (Umur Istri >35 Tahun); (3) Terlalu Dekat Jarak Anak (< 2Tahun); (4)

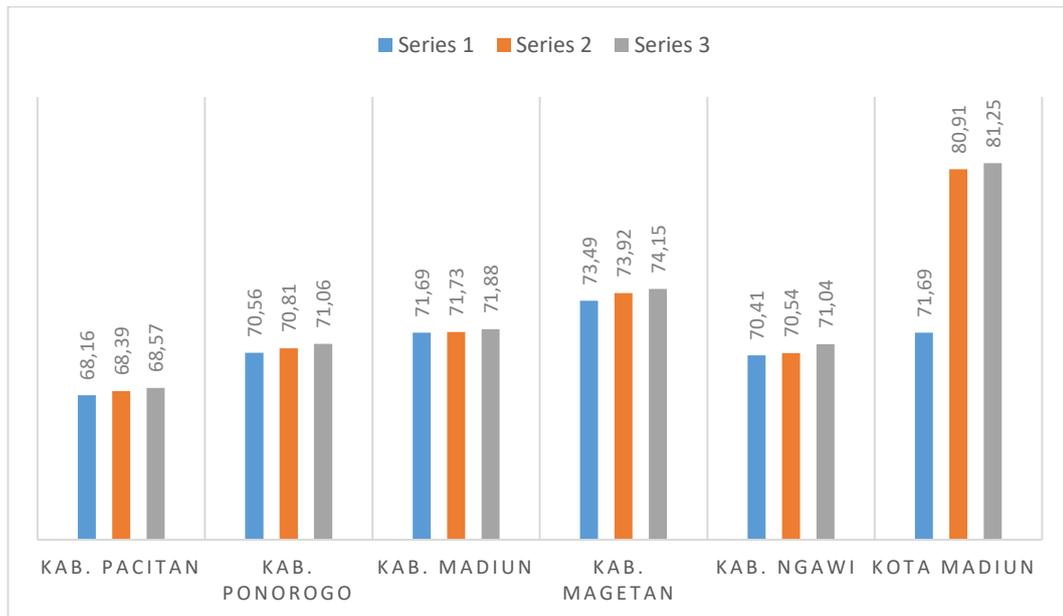
Terlalu Banyak Anak ( $\geq 3$  Anak). Dua variable sensitif adalah sebagai berikut: (1) Sumber air minum utama yang layak; (2) Keluarga tidak mempunyai jamban yang layak. Lihat gambar 2 berikut ini:

Count of KODE KELUARGA		KATEGORI KELUARGA BERPOTENSI RISIKO STUNTING			Grand Total
Kecamatan	Desa/Kelurahan	Rendah	Sedang	Tinggi	
Bandar	Bandar	157	1240		1397
Bandar	Petungsinarang	77	935		1012
Nawangan	Nawangan	230	815		1045
Nawangan	Pakis Baru	174	739		913
Nawangan	Penggung	252	941		1193
Nawangan	Sempu	144	912	1	1057
Sudimoro	Sudimoro	254	752	2	1008
Tegalombo	Kasihani	188	1038	1	1227
Tegalombo	Ploso	159	822	3	984
Tulakan	Kalikuning	361	1247	1	1609
<b>Grand Total</b>		<b>1996</b>	<b>9441</b>	<b>8</b>	<b>11445</b>

Sumber data : Data di Olah dari PK21 BKKBN

**Gambar 2. Grafis Kategori Keluarga Perpotensi Stunting Di Kabupaten Pacitan**

Berdasarkan survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 menyebutkan prevalensi stunting sebesar 22,7%. Angka ini masih jauh dari angka prevalensi yang ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024, yakni 14%. Kemudian, berdasarkan data dari hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 tren prevalensi stunting balita di Kabupaten Pacitan menunjukkan penurunan sebesar 11,7 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 34 % (Kab Pacitan, 2022). Kondisi Prevalensi stunting yang tinggi dapat berkorelasi dengan rendahnya indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pacitan, karena indeks pembangunan manusia menggambarkan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Berikut adalah data Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Pacitan pada dekade 2019-2022 (Kab Pacitan, 2022).



**Gambar 3. IPM Kabupaten eks Karesidenan Madiun**

Sumber: (Kab Pacitan, 2022)

Pacitan mendapat skor IPM terkecil diantara Kabupaten eks karesidenan Madiun, dengan total skor 68,57 yang terpaut jauh dari nilai tertinggi yakni Kota Madiun dengan skor 81,25. Skor IPM yang rendah menandakan pembangunan manusia di Pacitan masih cukup rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk peningkatan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pacitan. Salah satu caranya adalah dengan mengatasi dan menekan laju prevalensi stunting yang ada. Di antara pemicu tingginya angka stunting di Kabupaten Pacitan dikarenakan sulitnya masyarakat mendapatkan air bersih yang layak. Hal ini disebabkan letak geografis dan topografis Pacitan yang bergunung-gunung dan berbatu-batu, sehingga sumber mata air sulit didapatkan dan diakses.

Dengan demikian, upaya menekan dan mengurangi stunting di Pacitan ialah dengan membangun sarana air bersih di 10 Lokus desa stunting dengan jumlah 20 titik sarana air bersih, berikut adalah gambaran pembangunan sarana air bersih dalam rangka melakukan intervensi spesifik di Kabupaten Pacitan :



**Gambar 3. Pembangunan Sarana Air Bersih**

Sumber : dokumentasi peneliti, 2022

Laiknya Kabupaten lainnya, Kabupaten Pacitan juga telah melaksanakan program 8 aksi konvergensi stunting secara nyata, yakni: (1) analisis situasi stunting; (2) rencana kegiatan; (3) rebug stunting; (4) penerbitan peraturan bupati tentang Satuan Tugas Stunting; (5) pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM); (6) sistem manajemen data yang integral; (7) pengukuran dan publikasi stunting; (8) reviu kerja tahunan tentang stunting. Lihat gambar berikut ini:



**Gambar 4. Peneliti dalam *Rebug* Stunting Kab. Pacitan**



**Gambar 5: Bupati dan SKPD Hadiri Audit Stunting**

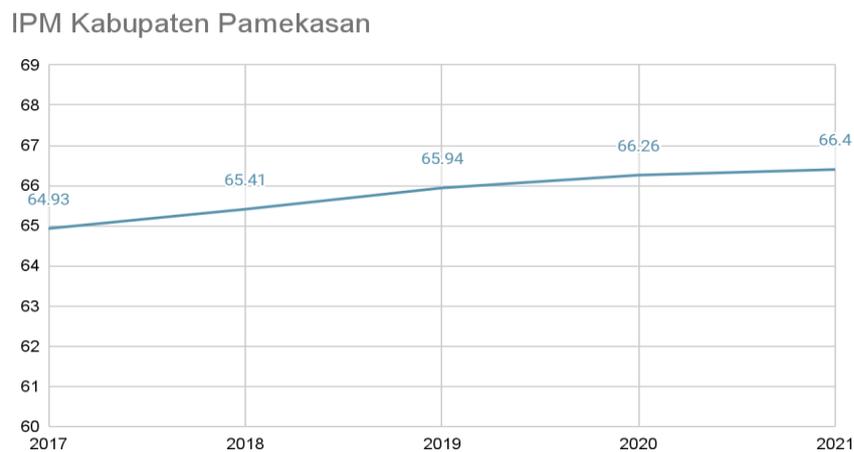
## 2. Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten dengan angka stunting tertinggi kedua di Jawa Timur. Untuk menganalisis tingginya angka stunting di Jawa Timur dapat dilihat melalui tingkat pelayanan kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), akses terhadap sanitasi, dan indikator-indikator lainnya.

Peserta jaminan kesehatan di Kabupaten Pamekasan cukup rendah, yaitu di angka 24,53% (BPS, 2021). Pada ibu hamil, hanya terdapat sebanyak 91,8% ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada trimester keempat. Lebih lanjut lagi, hanya terdapat 85.8% balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Rendahnya angka pengguna jaminan kesehatan di Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya kasus stunting.

Untungnya, pada aspek sanitasi, Kabupaten Pamekasan telah memiliki akses terhadap sanitasi yang layak atau jamban sehat sebanyak 100% (Dinkes Jawa Timur, 2021). IPM Kabupaten Pamekasan pada 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Pamekasan berada pada angka 66,6. Angka tersebut, lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM Jawa Timur yaitu 70,6 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021).



**Gambar 6. IPM Kabupaten Pamekasan**

Sumber: (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan, 2021)

Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah melaksanakan berbagai 8 aksi konvergensi stunting dalam upayanya untuk menangani tingginya angka stunting di Kabupaten Pamekasan. Rencana kegiatan pengentasan stunting di Kabupaten Pamekasan dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan nomor 57 tahun 2018 tentang Penurunan Stunting. Pada Perbup tersebut, Kabupaten Pamekasan berencana melakukan strategi peningkatan kemandirian keluarga, gerakan masyarakat hidup sehat, gerakan seribu hari pertama kehidupan, edukasi, pelatihan, dan penyuluhan gizi.

Manajemen data, pengukuran, dan publikasi kasus stunting juga diatur dalam Perbup ini. Pencatatan dan pelaporan penanganan kasus stunting dilakukan oleh setiap tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan. Pencatatan ini dilakukan menggunakan aplikasi Elektronik Human Development Worker (E-HDW) dan dilakukan secara berjenjang.

Kabupaten Pamekasan pada tahun 2022 telah melakukan rembung stunting pada 21 September 2022 bertempat di Azana Hotel. Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin, Ketua TP PKK Pamekasan, Nayla Baddrut Tamam, Kapolres Pamekasan, AKBP Rogib Triyanto, Dandim 0826 Pamekasan, Letkol Inf. Ubaidillah, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Imam Husairi, dan Camat se Kabupaten Pamekasan (Abdul, 2022).

Pada acara rembug stunting tersebut telah dibentuk pula tim khusus percepatan penurunan stunting Kabupaten Pamekasan yang melibatkan 12 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan, diantaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan. Tim khusus ini didampingi oleh institusi Polri dan TNI dari Kodim 0826 Pamekasan (Abdul, 2022).

Untuk memaksimalkan pengentasan stunting yang dilakukan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga merekrut 1.965 orang tim pendamping keluarga (TPK) dan mengoptimalkan peran Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) menjadi Pondok Bersalin Desa (Polindes) dengan menambah bidan desa (Abdul, 2022).

### **3. Kabupaten Malang**

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki kasus stunting yang tinggi. Tingginya angka stunting di Kabupaten Malang dapat dianalisis dengan melihat berbagai indikator terkait stunting, seperti tingkat pelayanan kesehatan, akses terhadap sanitasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indikator-indikator lainnya.

Pelayanan kesehatan berupa jaminan kesehatan di Kabupaten Malang sebesar 32,69% (Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, 2021). Layanan kesehatan pada ibu hamil sebesar 96,17% dan pada ibu bersalin sebesar 97,21 %. Di sisi lainnya, pelayanan kesehatan balita sesuai standar sebesar 95,01% (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2021). Dilihat dari segi sanitasi, saat ini masih terdapat 3,3% KK di Kabupaten Malang yang tidak memiliki jamban sehat (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2021).

IPM dapat menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam melihat stunting di sebuah daerah. Di Kabupaten Malang sendiri pada tahun 2022 sebesar 72,14, relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata IPM Jawa Timur yaitu sebesar 70,60. Namun demikian, IPM Kabupaten Malang selalu mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 2021).

Sebagai upaya pencegahan stunting, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan berbagai 8 aksi konvergensi. Analisis situasi dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malang bersama dengan Politeknik Kementerian Kesehatan Malang melakukan penelitian dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Balita di Kabupaten Malang. Hasil penelitian tersebut, dapat digarisbawahi bahwa stunting di Kabupaten Malang disebabkan karena beberapa hal seperti kurangnya pengetahuan gizi, pola asuh yang tidak tepat, kondisi rawan pangan, tidak dikonsumsi tablet tambah darah oleh ibu hamil, rendahnya sanitasi, rendahnya pendapatan, dan faktor sosial budaya (Supriasa & Purwaningsih, 2019).

Rencana kegiatan penanganan stunting Kabupaten Malang dituangkan pada Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Upaya Pencegahan

Stunting dengan tujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan dengan melibatkan semua unsur Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, swasta dan masyarakat. Dijelaskan pula peranan desa dalam mengentaskan stunting seperti ikut serta dalam penguatan Pos Pelayanan Terpadu dan Pos Kesehatan Desa, pembentukan forum pencegahan stunting di tingkat desa, rembuk stunting di tingkat desa, dan ikut mendanai upaya pencegahan stunting tingkat desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Kesehatan telah menyelenggarakan Rembuk Stunting bertema Rembuk Aksi Percepatan Penurunan Stunting Kab. Malang Tahun 2022 pada 7 September 2022 bertempat di Grand Miami Hotel. Hadir dalam acara tersebut Kepala OPD di Kabupaten Malang termasuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Dinas Pendidikan Kab Malang, 2022).

Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Kabupaten Malang telah dilakukan diadakannya Bimbingan Teknis Fasilitasi Convergensi Stunting di Desa dan Aplikasi Elektronik Human Development Worker (E-HDW) untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) pada 30 Agustus 2022. Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta dilaksanakan di Ruang Rapat Anusapati Malang (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2022).

Aplikasi eHDW atau e-Human Development Worker merupakan aplikasi seluler berbasis android sebagai alat bantu kerja Kader Pembangunan Manusia (KPM). Aplikasi ini dikembangkan sebagai solusi digital yang mempermudah Desa dan KPM dalam pengumpulan data, pemantauan, Pencatatan dan pelaporan. Terdapat lima paket layanan pencegahan stunting dalam aplikasi tersebut diantaranya kesehatan ibu dan anak, konseling gizi terpadu, air bersih dan sanitasi, perlindungan sosial, dan pendidikan anak usia dini.

Pengukuran dan publikasi stunting di Kabupaten Malang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan telah di Publikasikan pada dokumen Kabupaten Malang Satu Data 2022 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang (Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Malang, 2022).

No.	Puskesmas	Sangat Pendek			Pendek			Sangat Pendek			Pendek		
		Februari 2020	Stunting	Agustus 2020	Stunting	Februari 2021	Stunting	Agustus 2021	Stunting				
1	Donomulyo	26	161	187	32	187	219	43	379	422	18	148	166
2	Kalipare	38	167	205	41	150	191	27	121	148	23	114	137
3	Pagak	0	131	131	1	82	83	264	242	506	0	19	19
4	Sumbermanjing Kulon	36	70	106	21	65	86	5	83	88	3	23	26
5	Bantur	26	167	193	62	130	192	25	128	153	21	107	128
6	Wonokerto	24	370	394	8	315	323	7	277	284	10	143	153
7	Gedangan	19	97	116	0	41	41	1	66	67	1	24	25
8	Sitarjo	100	239	339	53	173	226	27	127	154	15	61	76
9	Sumbermanjing Wetan	118	560	678	125	386	511	121	481	602	97	461	558
10	Dampit	45	386	431	35	146	181	88	241	329	15	52	67
11	Pamotan	134	238	372	119	265	384	230	291	521	61	88	149
12	Tirtoyudo	185	398	583	106	268	374	84	245	329	32	147	179
13	Ampelading	20	73	93	20	73	93	20	73	93	19	73	93
14	Pencokusumo	5	121	126	24	189	213	24	154	178	11	127	138
15	Wajak	61	449	510	24	303	327	13	176	189	1	211	212
16	Turen	215	805	1020	215	896	1111	120	893	1013	74	535	609
17	Bululawang	127	573	700	95	426	521	185	714	899	300	904	1204
18	Gondanglegi	144	498	642	216	550	766	96	368	464	46	247	293
19	Ketawang	91	142	233	44	142	186	20	128	148	2	15	17
20	Pagelaran	71	580	651	21	280	301	6	372	378	3	96	99
21	Kepanjen	106	336	442	82	230	312	87	373	460	15	90	105
22	Sumberpucung	175	476	651	147	335	482	126	263	389	15	11	26
23	Kromengan	22	213	235	20	296	316	15	220	235	17	109	126
24	Ngajum	255	668	923	176	364	540	228	333	561	21	219	240
25	Wonosari	29	147	176	27	191	218	45	143	188	2	12	14
26	Wagir	104	435	539	44	217	261	48	216	264	36	110	146
27	Pakisaji	94	466	560	61	300	361	72	313	385	3	65	68
28	Tajinan	146	622	768	230	630	860	169	548	717	71	152	223
29	Tumpang	167	459	626	122	594	716	124	431	555	166	821	987
30	Pakis	3	1657	1660	1	216	217	0	607	607	5	87	92
31	Jabung	163	485	648	154	417	571	138	446	584	63	111	174
32	Lawang	45	321	366	201	461	662	43	618	661	36	315	351
33	Singosari	0	305	305	1	367	368	8	205	213	4	99	103
34	Ardimulyo	127	365	492	114	301	415	46	250	296	44	306	350
35	Karangploso	119	360	479	120	209	329	41	236	277	47	213	260
36	Dau	66	311	377	61	165	226	38	150	188	25	71	96
37	Pujon	297	790	1087	219	650	869	221	660	881	19	61	80
38	Ngantang	148	490	638	103	419	522	95	371	466	8	33	41
39	Kasembon	37	219	256	18	201	219	13	150	163	6	47	53
<b>TOTAL</b>		<b>3,588</b>	<b>15,350</b>	<b>18,938</b>	<b>3,163</b>	<b>11,630</b>	<b>14,793</b>	<b>2,963</b>	<b>12,092</b>	<b>15,055</b>	<b>1,355</b>	<b>6,527</b>	<b>7,882</b>

Sumber : Dinas Kesehatan

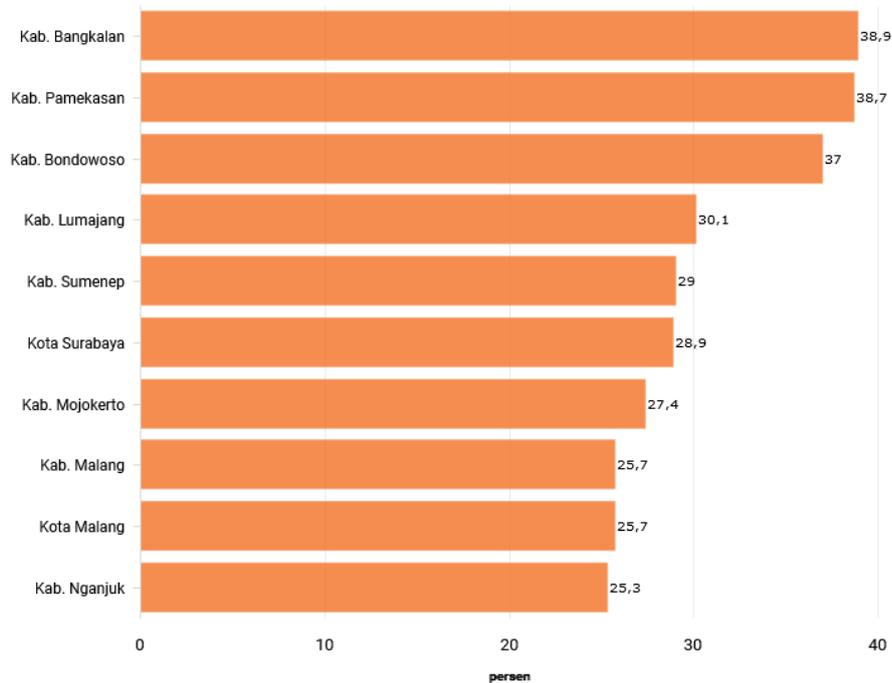
**Gambar 7. Angka stunting di semua kecamatan di Kabupaten Malang. Sumber Kabupaten Malang Dalam Angka 2022.**

### **Proyeksi dan Peluang Prevalensi Penurunan Stunting Di Kabupaten Pacitan, Pamekasan dan Malang Sebagai Gambaran Di Provinsi Jawa Timur**

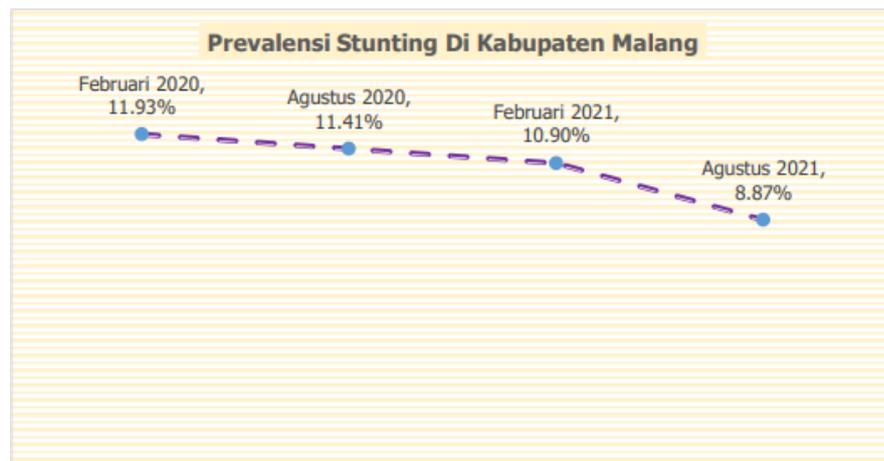
Potensi stunting di Kabupaten Pacitan Pada tahun 2021 menyebutkan bahwa 3.905 dari 26.155 balita dinyatakan stunting, sedangkan menurut data dari kepala dinas Kesehatan Pacitan untuk tahun 2022 potensi stunting kabupaten pacitan sebanyak 10.375 kasus balita. Hal ini tentu menyebabkan kerja sama dan kerja keras seluruh lembaga dan stakeholder yang ada di Kabupate pacitan menjadi harus lebih ekstra.

Koherensi antara semua lembaga dikabupaten pacitan sangat diperlukan yang juga dengan melakukan langkah-langkah strategis. Lalu untuk sumber daya manusia untuk membantu menurunkan Stunting di Kabupaten Pacitan Sumber Daya Manusia yang tersedia terdiri dari Kader IMP (PPKBD dan Sub PPKB) sebanyak 1.762 orang. Penyuluh KB sebanyak 28 orang. Kemudian, Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 1.356 orang. Pacitan juga didukung dengan telah terbentuk 1 TPPS tingkat Kabupaten, 12 TPPS tingkat Kecamatan dan 171 TPPS tingkat Desa/Kelurahan.

Sementara itu, angka prevalensi stunting Kabupaten Pamekasan menempati posisi kedua tertinggi di Provinsi Jawa Timur dengan angka 38,7%. Kondisi menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat, apalagi pada tahun 2024 target prevalensi stunting diangka 14% (Viva Budy Kusnandar, 2022). Lihat Grafis berikut ini:



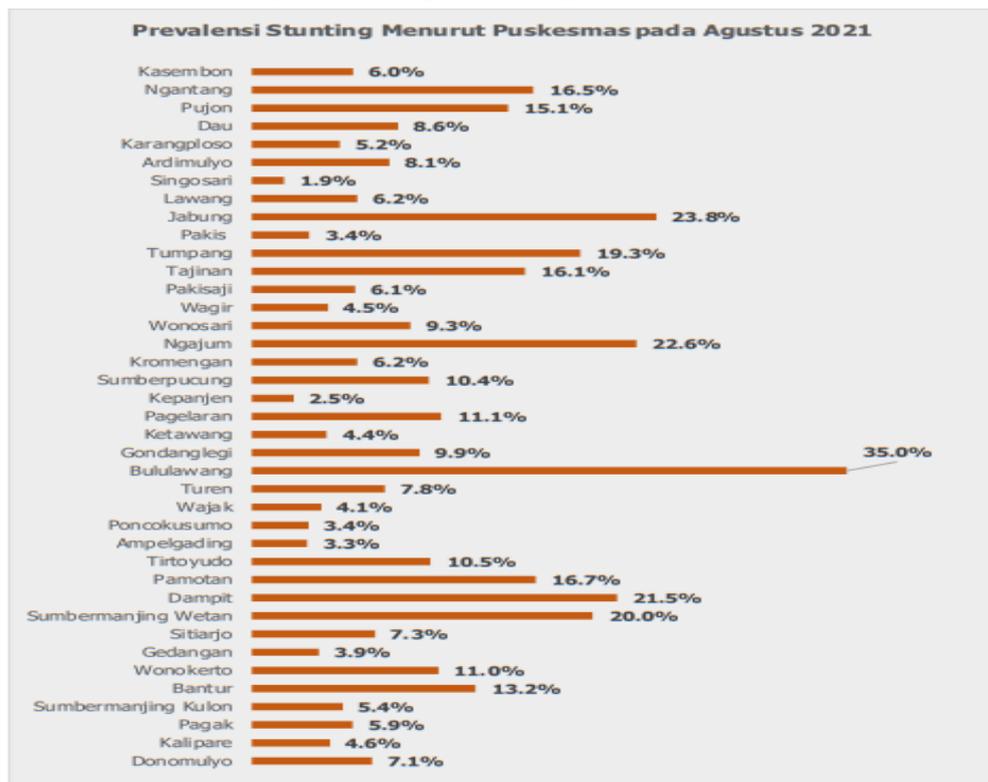
Di sisi lainnya, Kabupaten Malang angka prevalensi stuntingnya berada pada nilai 25,7%, jika dibandingkan dengan angka prevalensi stunting Jawa Timur sebesar 23,5% masih terpaut 2,2% angka yang cukup besar. Diagram garis di bawah menunjukkan tingkat pravelensi stunting di Kabupaten Malang (Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Malang, 2022).



**Gambar 8. Diagram Garis Pravelensi Stunting Kabupaten Malang 2021**

Diagram garis tersebut di atas, dapat terlihat bahwa angka pravelensi stunting di Kabupaten Malang sudah semakin menurun sejak tahun 2020. Pada agustus tahun 2021, angka pravelensi stunting Kabupaten Malang berada pada angka 8.87%. Lalu dari keseluruhan kecamatan di Kabupaten Malang, angka pravelensi stunting paling tinggi ada pada Kecamatan Bululawang dengan angak 35%,

sedangkan angka pravelnsi stunting paling rendah ada pada 1,9%. Data angka pravelnsi stunting setiap kecamatan di Kabupaten Malang (Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Malang, 2022), dapat dilihat pada Tabel berikut ini:



**Gambar 9. Prevelensi Stunting Menurut Puskesmas pada Agustus 2021**

Poin terpenting dari tinjauan di tiga kabupaten tersebut di atas, adalah terlihat adanya komitmen dan keseriusan secara jelas dari masing-masing pemerintah daerah tersebut, terkait dengan penurunan prevalensi stunting menuju target 14% pada tahun 2024. Indikator komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dapat dilihat sebagai berikut:



**Gambar 9. Indikator Keseriusan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Stunting**

Dengan demikian, upaya percepatan penurunan stunting di tiga Kabupaten tersebut, sebagai gambaran di wilayah Jawa Timur pada hakikatnya secara agregat, hasilnya mulai tampak nyata, dan perlu dioptimalkan lagi agar mencapai target dan harapan yang telah ditentukan.

### **Simpulan dan Rekomendasi Kebijakan**

Capaian Prevalensi Stunting di Jawa Timur mulai tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami penurunan. Walaupun belum sampai menyentuh target tahunan, namun tercatat menurun dari 26,86% pada 2019 menjadi 25,64% pada 2020. Kemudian menjadi 23,5% pada tahun 2021. Dengan demikian, dibutuhkan kerja-kerja keras, kolaboratif dan sinergis disemua tingkatan. Muaranya, percepatan penurunan angka stunting di Jawa Timur sesuai dengah target, yakni 14% pada tahun 2024.

Dalam kaitan ini, terdapat tiga rekomendasi yang dapat dipertimbangkan baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang:

1. Percepatan penurunan prevalensi stunting di Jawa Timur, dibutuhkan daya dukung secara TSM (Terstruktur, Sistemik, dan Massif) dengan melibatkan peranan phenta-helix, yakni, akademisi, praktisi/ bisnis, pemerintah (eksekutif, yudikatif, dan legislatif), dan mass media;
2. Harus dilakukan kontrol dan pengawasan secara berkala atas delapan (8) aksi konvergensi prevalensi di masing-masing wilayah, mulai dari sosialisasi berfokus pada perubahan perilaku, komitmen dan akuntabilitas konvergensi, koordinasi dan sinkronisasi program pencegahan stunting;
3. Perlu adanya pemberian penghargaan, berupa (*reward*) bagi pemerintah daerah yang mencapai target penurunan prevalensi stunting dan diberlakukan sangsi, berupa (*punishment*) bagi pemerintah daerah yang gagal atau tidak serius dalam penanganan stunting di wilayahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. (2022, October). Pemkab Pamekasan Bentuk Timsus Penurunan Stunting. *Jatim.Antaraneews.Com*.  
<https://jatim.antaranews.com/berita/645545/pemkab-pamekasan-bentuk-timsus-penurunan-stunting>
- Badan Pusat Statistik Jawa Timur. (2021). *Jawa Timur dalam Angka 2021*.  
<https://jatim.bps.go.id/publication/2022/02/25/33699f6fcd84e0e2a0ad96f0/pr-ovinsi-jawa-timur-dalam-angka-2022.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang Tahun 2021*.  
<https://malangkota.bps.go.id/pressrelease/2021/12/04/258/indeks-pembangunan--manusia--ipm--kota-malang-tahun-2021.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pamekasan 2021*.  
<https://pamekasankab.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2021). *Komponen IPM Jawa Timur*.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. (2021). *Profil Kesehatan Jawa Timur 2021*.  
[https://dinkes.jatimprov.go.id/userfile/dokumen/PROFIL\\_KESEHATAN\\_2021\\_JATIM.pdf](https://dinkes.jatimprov.go.id/userfile/dokumen/PROFIL_KESEHATAN_2021_JATIM.pdf)
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Malang. (2022). *Kabupaten Malang Satu Data*. <https://satudata.malangkab.go.id>
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2022, December). Bimbingan Teknis Fasilitasi Convergensi Stunting di Desa dan Aplikasi Elektronik Human Development Worker (E-HDW) untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM) Tahun Anggaran 2022. *Https://Pmd.Malangkab.Go.Id/*, 1–30.  
<https://pmd.malangkab.go.id/pd/detail?title=pmd-opd-bimbingan-teknis-fasilitasi-convergensi-stunting-di-desa-dan-aplikasi-elektronik-human-development-worker-e-hdw-untuk-kader-pembangunan-manusia-kpm-tahun-anggaran-2022>
- Dinas Pendidikan Kab Malang. (2022, December). Rembuk Stunting Kabupaten Malang Tahun 2022. *Https://Malangkab.Go.Id*.  
<https://malangkab.go.id/mlg/default/page?title=dispendik-opd-rembuk-stunting-kabupaten-malang-tahun-2022>
- Dinkes Jawa Timur. (2021). *Profil Kesehatan Jawa Timur 2021*.
- Kab Pacitan. (2022). *Strategi Konvergensi Penurunan Stunting Di Pacitan*.  
<https://pacitankab.go.id/tag/stunting/>
- Mohammad Yasin. (2022). *Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Jawa Timur*.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. (2021). *Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021*.  
[https://malangkab.go.id/uploads/dokumen/malangkab-pusat-opd-RLPPD-Kabupaten\\_Malang\\_2021.pdf](https://malangkab.go.id/uploads/dokumen/malangkab-pusat-opd-RLPPD-Kabupaten_Malang_2021.pdf)
- Sri Untari Bisowarno. (2022). *Dukungan Legislatif dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jawa Timur*.

- Supariasa, I. D. N., & Purwaningsih, H. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Balita Di Kabupaten Malang. *E-Jurnal Inovasi Dan Pembangunan Daerah*, 1(2).  
<https://ejurnal.malangkab.go.id/index.php/kr/article/view/21>
- Viva Budy Kusnandar. (2022, July). 10 Wilayah dengan Prevalensi Balita Stunting Terbesar di Jawa Timur. *Data Boks*, 1–2.  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/10-wilayah-dengan-prevalensi-balita-stunting-terbesar-di-jawa-timur>